



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 28/Kept/Sekda/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 6/Kept/Sekda/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN PADA BAGIAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menyesuaikan personel yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6/Kept/Sekda/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 112);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 30);
10. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6/Kept/Sekda/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21/Kept/Sekda/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6/Kept/Sekda/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6/Kept/Sekda/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN PADA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6/Kept/Sekda/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 pada lampirannya yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2024.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 28 /Kept/Sekda/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 6/Kept/Sekda/2024 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NO	BAGIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bagian Hukum	Siti Nurhidayati, S.H., M.H.	197705301998032002	Penata Tk. I, III/d	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
					Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	a. Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan
						b. Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan

NO	BAGIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		Jarot Anggoro Jati, S.H.	197202152006041005	Penata Tk. I, III/d	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	a. Fasilitasi Bantuan Hukum
						b. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
2.	Bagian PPSDA	Andy Yudho Nurchahyo, ST, M.Si	198002162010011008	Penata Tk. I, III/d	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan Kelautan dan Perikanan
						b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
3.	Bagian Tata Pemerintahan	Priska Lenora Titisari, S.P. M.Ec.Dev.	198102052010012010	Penata Tk. I, III/d	Administrasi Tata Pemerintahan	a. Penataan Administrasi Pemerintahan
					Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
						Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan

NO	BAGIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
					Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
		Ani Meidiani, S.I.P., M.Sc.	198005212009032008	Penata Tk. I, III/d	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
					Fasilitasi Kerjasama Daerah	a. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
						b. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
4.	Bagian Pengadaan	Sunarto, S.S.T.	197303071995031001	Penata Tk.I / IIIId	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	Barang dan Jasa	Arki Yudha Arsono, S.Pi. M.M.M., M.URP	198606132010011008	Penata Tk.I / IIIId	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
5.	Bagian Organisasi	Suryanti, S.IP., M. IKOM.	197801031998032002	Penata Tk. I, III/d	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
					Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota
		Denny Setiawan, S.I.P.	197611232011011001	Penata Tk I III/ d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
					Penataan Organisasi	a. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

NO	BAGIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						b. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
						c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
					Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota
6.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Agung Setyawan, S.Hut.	197604082012121001	Penata, III/c	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
						b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
						c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
7.	Bagian Umum dan Protokol	Dian Rustamaji, S.E.	197712012012121001	Penata, III/c	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan
		Agus Winarno, S.S.T.	19730161997031005	Penata Tk.I III/d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

NO	BAGIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
						f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Pengadaan Mebel
						b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						e. Pemeliharaan Mebel
						f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

NO	BAGIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	a. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
						b. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
					Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
						b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
						c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

NO	BAGIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
8.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Nining Lestari, S.I.P.	197611121998032002	Penata Tk.I III/d	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
						c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
						c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA